

PAPARAN

**CAPAAN
PENERAPAN SPM 2020
URUSAN KESEHATAN
PROVINSI
SUMATERA UTARA**



Disampaikan Oleh:

DR. ZAMZANI TJENRENG

**Kepala Bagian Perencanaan
Ditjen Bina Pembangunan Daerah**



DASAR HUKUM



DASAR HUKUM



**UU 23
2014**

Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh** setiap warga negara secara minimal.

**UU
23/2014**

Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**

Pasal 298: Belanja Daerah **diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar** yang **ditetapkan** dengan standar pelayanan minimal

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya

PP 2/2018



**Permendagri
100/2018**

**Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat**

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

**Peraturan
Menteri terkait
tentang Standar
Teknis 6 bidang
SPM**





PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SPM



Permendikbud 32/2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



Permenkes 4/2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



PermenPUPR 29/Prt/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Permendagri 101/2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM
Sub-urusan Bencana Daerah kabupaten/kota



Permendagri 114/2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM
Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota



Permendagri 121/2018 standar teknis mutu pelayanan dasar
Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota



Permensos 9/2018 Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada spm bidang sosial
Di daerah provinsi dan di daerah kab/kota



KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM

1

Mengintegrasikan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

2

Menyusun Pembiayaan Melalui Perencanaan Anggaran dalam APBD

3

Mengalokasikan Anggaran

4

Melaksanakan SPM Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat

5

Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

6

Melaporkan Capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prinsip Penerapan SPM

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

01 - Kesesuaian kewenangan

SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kab/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

02 - Ketersediaan

SPM ditetapkan dan diterapkan dlm rangka menjamin tersedianya brg dan/atau jasa kebutuhan dasar yg berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

03 -Keterjangkauan

SPM ditetapkan dan diterapkan dlm rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara.

04 - Kesiambungan

SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus.

05 - Keterukuran

SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

06 - Ketepatan sasaran

SPM ditetapkan & diterapkan utk pemenuhan kebutuhan dasar yg berhak diperoleh setiap WN scr minimal dgn memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.





IMPLEMENTASI SPM



Tahapan Penerapan SPM

PP No 2/2018 tentang SPM

Permendagri No 100/2018 tentang Penerapan SPM

1

Pengumpulan
Data

2

Penghitungan
Kebutuhan

3

Penyusunan
Rencana

4

Pelaksanaan

1

Pengumpulan Data

- ❖ Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- ❖ Jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- ❖ Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

CONTOH SPM KESEHATAN PROVINSI

JENIS LAYANAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	* Kab/kota terdampak bencana, biaya transportasi ke lokasi * Jumlah alat, bahan, obat, vaksin, yang tersedia dan yang dibutuhkan * Jumlah faskes dan SDM * Jumlah penduduk di daerah rawan bencana (estimasi dan riil) * Jumlah penduduk terdampak bencana (estimasi dan riil)
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	* Kab/kota terdampak bencana, biaya transportasi ke lokasi * Jumlah alat, bahan, obat, vaksin, yang tersedia dan yang dibutuhkan * Jumlah faskes dan SDM * Jumlah penduduk di rawan KLB (estimasi dan riil) * Jumlah penduduk terdampak KLB (estimasi dan riil)

Tim Penerapan SPM:
Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

2

Penghitungan Kebutuhan

- ❖ Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
- ❖ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	INDIKATOR SPM/SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	- Jumlah seluruh penduduk berpotensi krisis kesehatan/berpotensi terkena bencana (Target A), - Jumlah seluruh penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana (Target B) pada periode satu tahun	Persentase (%) penduduk rawan (potensi) bencana dan penduduk terdampak bencana, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada periode satu tahun	(a) Transportasi petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Jumlah Desa, Lokasi Rawan dan terdampak bencana (c) Bahan medis habis pakai, materi KIE, buku pencatatan, hygiene/family kit (d) Makanan tambahan bayi, ibu hamil dan anak) (e) Jumlah target	I. Jumlah Desa x Transportasi petugas x jumlah petugas II. Jumlah Target x Unit Biaya bahan medis habis pakai, hygiene/family kit, obat, makanan tambahan) III. Alat medis berikut nilai depresiasi per tahun)
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	- Jumlah seluruh penduduk berpotensi terdampak KLB (Target A) - Jumlah seluruh terdampak KLB (Target B) pada periode satu tahun	Persentase (%) penduduk rawan (potensi) KLB dan penduduk terdampak KLB, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada periode satu tahun	(a) Transportasi petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Jumlah Desa, Lokasi Rawan dan terdampak KLB (c) Bahan medis habis pakai, materi KIE, buku pencatatan, kit pemeriksaan (d) Profilaksis, obat, (e) Jumlah target	I. Jumlah Desa x Transportasi petugas x jumlah petugas II. Jumlah Target x Unit Biaya bahan medis habis pakai, materi KIE, obat/Profilaksis) III. Alat medis berikut nilai depresiasi per tahun)

Tim Penerapan SPM:
Mengoordinasikan
penghitungan
kebutuhan SPM

3

Penyusunan Rencana

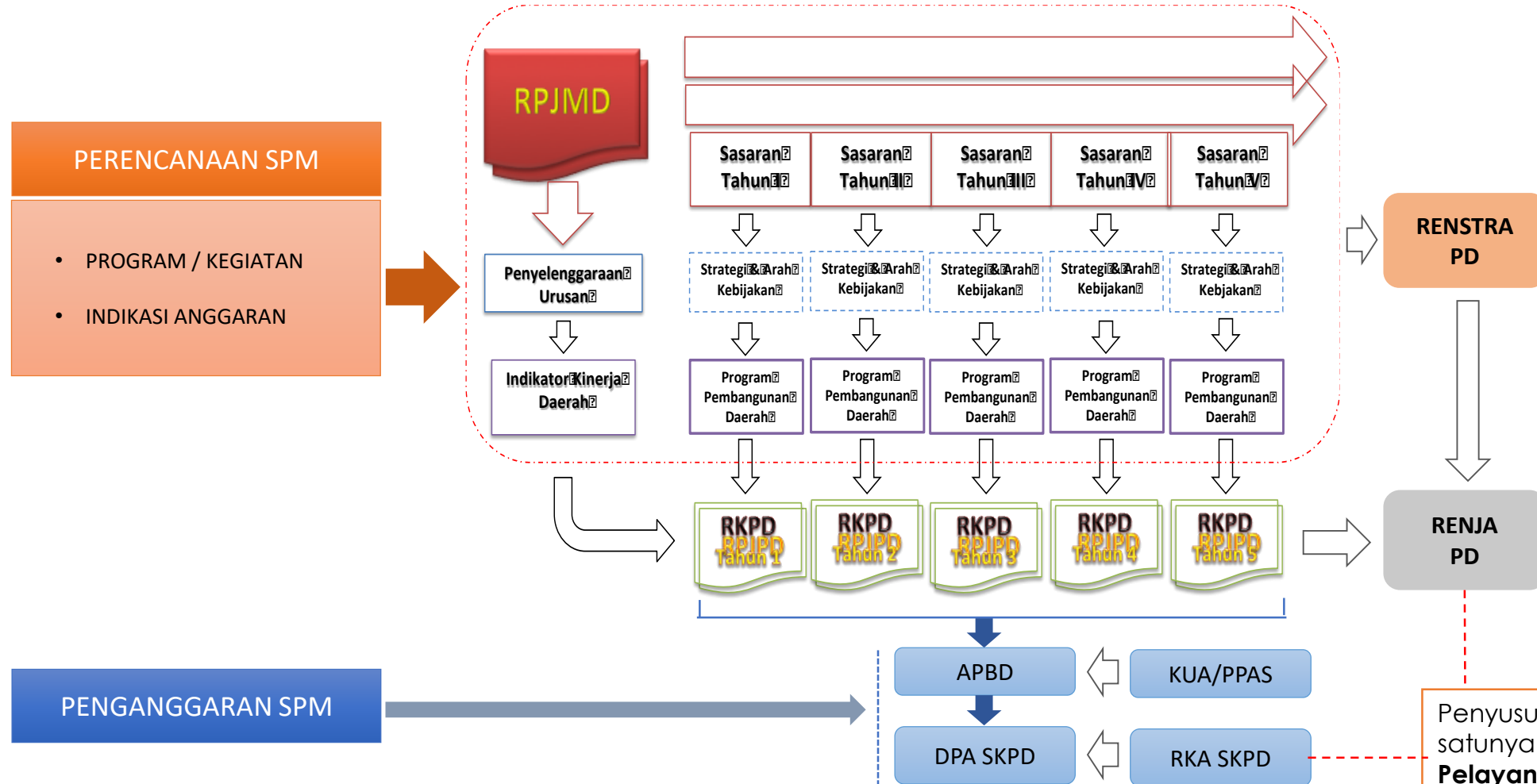
- ❖ Terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD
- ❖ Terintegrasi dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi

Tim Penerapan SPM

1. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokren Penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Prov;
2. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Prov dan Kab/Kota;
3. Mengoordinasikan integrasi SPM ke Dalam Dokren serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk Binwas Umum dan Teknis;



SPM dalam Dok. Rencana dan Dok. Anggaran



PP 12/2019

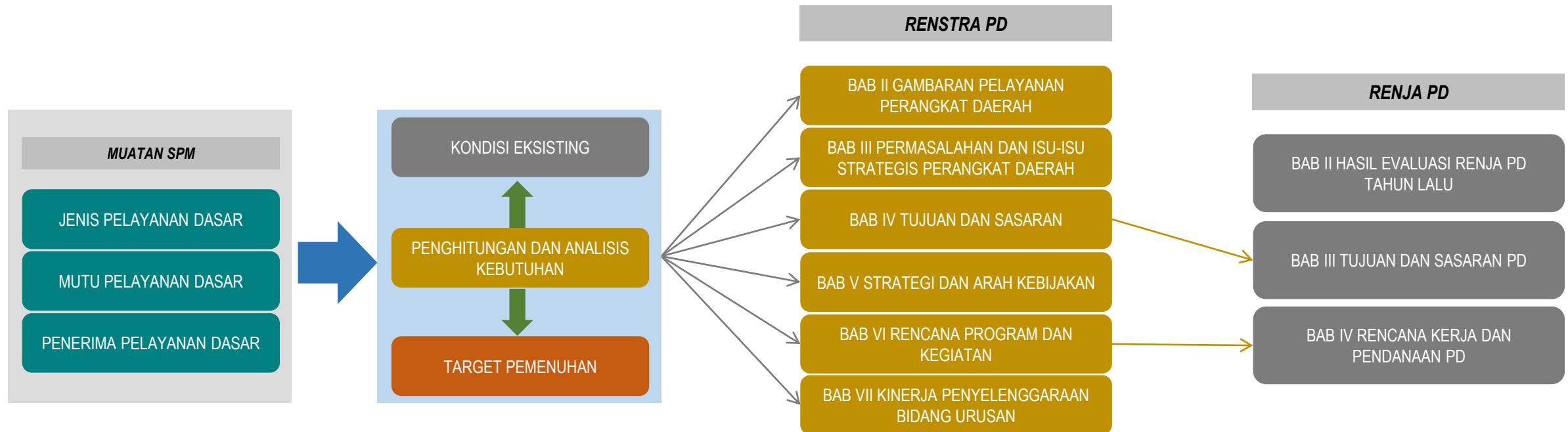
Penyusunan **RKA** **SKPD** salah satunya **berpedoman** pada **Standar Pelayanan Minimal**.

Verifikasi oleh TAPD salah satunya dilakukan untuk menelaah **kesesuaian** antara **RKA** **SKPD** dengan **Standar Pelayanan Minimal**

Integrasi SPM dalam RPJMD dan RKPD



Integrasi SPM dalam Renstra dan Renja PD



STRATEGI PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, TARGET DAN ANGGARAN

CATATAN

- ❑ Penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat
- ❑ Program dan kegiatan beserta indikator dan target harus mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan
- ❑ **Program, kegiatan, indikator dan target harus sinkron atau tegak lurus dengan target nasional**

KISI KISI PENYUSUNAN



4

Pelaksanaan

- ❖ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
- ❖ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU

Tim Penerapan SPM

1. Mengoordinasikan pelaksanaan SPM terutama terkait kegiatan yang sifatnya lintas sektor;
2. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Prov dan Kab/Kota;
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan SPM sesuai dengan yang direncanakan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BINWAS SPM

MENTERI melalui DIRJEN BINA BANGDA melakukan PEMBINAAN umum, dan MENTERI TEKNIS yang membidangi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar melakukan PEMBINAAN TEKNIS terhadap PENERAPAN SPM DAERAH PROVINSI

MENTERI melalui INSPEKTORAT JENDERAL melakukan PENGAWASAN terhadap PENERAPAN SPM DAERAH PROVINSI

GUBERNUR melakukan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM DAERAH KABUPATEN/KOTA yang ada dalam wilayah administrasinya

BUPATI/WALIKOTA melakukan PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN SPM DAERAH KABUPATEN/KOTA dalam kewenangannya.



MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



Hubungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis fungsional



Data Capaian SUMUT



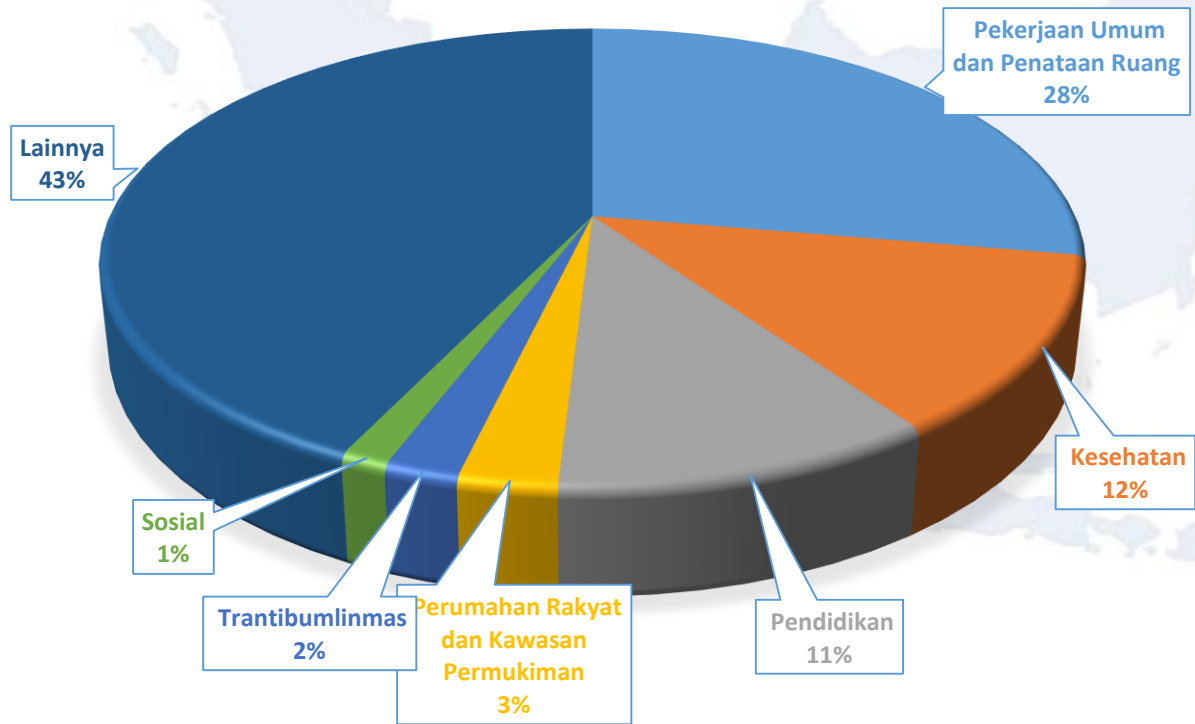


PROVINSI SUMATERA UTARA

RKPD PROVINSI 2021

PAGU Rp. 6.189.839.740.438

PROPORSI ANGGARAN YANDAS DGN LAINNYA



ANGGARAN UNTUK SETIAP BIDANG :

NO	BIDANG	ANGGARAN	%
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.715.681.334.887	27,72
2	Kesehatan	773.841.662.306	12,50
3	Pendidikan	663.405.071.060	10,72
4	Administrasi Pemerintahan	608.828.977.573	9,84
5	Keuangan	261.438.858.280	4,22
6	Pertanian	238.730.927.360	3,86
7	Pangan	175.897.726.266	2,84
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	172.420.249.936	2,79
9	Kebudayaan	144.981.764.625	2,34
10	Trantibumlinmas	130.088.108.366	2,10
11	Perhubungan	98.038.957.639	1,58
12	Kelautan dan Perikanan	92.329.980.760	1,49
13	Sosial	82.914.171.753	1,34
14	Pengawasan	78.658.674.300	1,27
15	Energi dan Sumberdaya Mineral	60.934.911.114	0,98



PROVINSI SUMATERA UTARA

RKPD PROVINSI 2021

ANGGARAN UNTUK SETIAP BIDANG :

NO	BIDANG	ANGGARAN	%
16	Kehutanan	60.827.302.174	0,98
17	Lingkungan Hidup	60.187.000.000	0,97
18	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47.042.740.557	0,76
19	Komunikasi dan Informatika	42.361.244.389	0,68
20	Tenaga Kerja	34.399.999.714	0,56
21	Pendidikan dan Pelatihan	34.181.020.861	0,55
22	Perdagangan	31.046.629.833	0,50
23	Perencanaan	29.566.769.360	0,48
24	Perpustakaan	28.182.459.575	0,46
25	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.213.863.935	0,39
26	Kepegawaian	22.541.999.869	0,36
27	Penelitian dan Pengembangan	18.699.477.262	0,30
28	Penanaman Modal	18.448.110.870	0,30
29	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.298.000.000	0,25
30	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.236.999.721	0,21
31	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.098.000.000	0,18

PROVINSI SUMATERA UTARA

Anggaran bidang kesehatan

BIDANG KESEHATAN		773.841.662.306	
NO	PROGRAM	ANGGARAN	%
1	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	309.651.437.000	40,01
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus / Laboratorium Kesehatan	82.062.879.223	10,60
3	Pelayanan BLUD RS	61.999.918.471	8,01
4	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	60.378.830.784	7,80
5	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	38.835.615.328	5,02
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.978.114.822	4,00
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/Rumah Sakit Khusus/Laboratorium Kesehatan	25.722.517.500	3,32
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.806.285.525	3,08
9	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	18.592.153.364	2,40
10	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	17.299.782.500	2,24
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.109.163.129	1,82
12	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	12.500.000.000	1,62
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.040.433.970	1,43
14	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.903.363.988	1,41
15	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.834.069.134	1,14
16	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6.655.342.750	0,86

NO	PROGRAM	ANGGARAN	%
17	Upaya Kesehatan Masyarakat	6.653.780.460	0,86
18	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	6.180.685.250	0,80
19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	5.506.012.350	0,71
20	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.200.000.000	0,67
21	Upaya Kesehatan Masyarakat	3.627.352.194	0,47
22	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	3.500.000.000	0,45
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.324.139.500	0,30
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.478.185.250	0,19
25	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.334.216.000	0,17
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.163.422.000	0,15
27	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	553.767.204	0,07
28	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	338.200.610	0,04
29	Standart Pelayanan Kesehatan	330.090.000	0,04
30	Peningkatan Disiplin Aparatur	205.377.900	0,03
31	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	178.858.000	0,02
32	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.217.000	0,00
33	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.050.000	0,00

PAGU SPM KESEHATAN PADA APBD BIDANG KESEHATAN (RKPD 2020)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi	Total Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Bidang Kesehatan (Rp)	Pagu Anggaran SPM Kesehatan (Rp)
1	Sulsel	16,443,481,145,826	3,937,479,712,338	11,162,130,021
2	Jatim	10,009,530,000,000	2,605,784,570,700	3,090,000,000
3	Jateng	8,926,893,579,000	2,036,547,321,000	2,070,000,000
4	Aceh	8,149,047,351,062	1,384,550,068,022	12,741,009,517
5	Banten	4,924,062,305,482	666,504,100,000	403,200,000
6	Riau	4,624,949,890,996	728,924,361,373	971,890,000
7	Papua Barat	4,361,358,065,640	119,776,005,535	4,300,000,000
8	Sumsel	3,946,122,361,536	289,516,600,437	1,177,850,000
9	Sumbar	3,642,673,645,850	747,706,500,491	379,314,800
10	Kalsel	3,364,691,531,380	699,649,274,389	1,608,192,845
11	Kepri	3,198,954,761,652	254,265,856,163	130,000,000
12	Kalteng	2,799,997,888,459	336,504,935,000	795,000,000
13	Kalbar	2,729,540,222,779	239,105,555,962	831,775,400
14	Lampung	2,721,893,000,000	464,000,000,000	1,000,000,000
15	NTB	2,639,936,953,471	548,833,939,085	3,870,188,188
16	Sulut	2,170,619,311,963	573,656,064,410	488,980,800
17	Jambi	1,985,999,391,115	238,601,024,157	-
18	Bali	1,857,054,040,730	375,914,651,384	522,300,000
19	Babel	1,510,142,279,407	172,050,041,205	1,008,312,000
20	Sulbar	1,284,699,396,979	156,440,694,996	274,797,900
21	Gorontalo	966,564,659,028	130,257,445,544	978,115,000
22	Sumut	6,189,839,740,438	773,841,662,306	1,473,768,000
23	DKI			1,800,000,000
24	Jabar	12,613,684,609,173	2,004,894,307,497	1,800,521,160
25	Kalbar	2,729,540,222,779	239,105,555,962	831,775,400
26	Sultra		171,177,370,000	3,740,000,000
27	Sulteng			32,310,453,200
28	DIY			5,074,676,000

Pagu SPM Kesehatan pada RKPD Sumut 2020 sebesar Rp 1,473 milyar dari total Rp 773,8 milyar untuk Kesehatan

(Berdasarkan RKPD tahun 2020, sebelum refocusing/realokasi akibat Pandemic Covid-19).

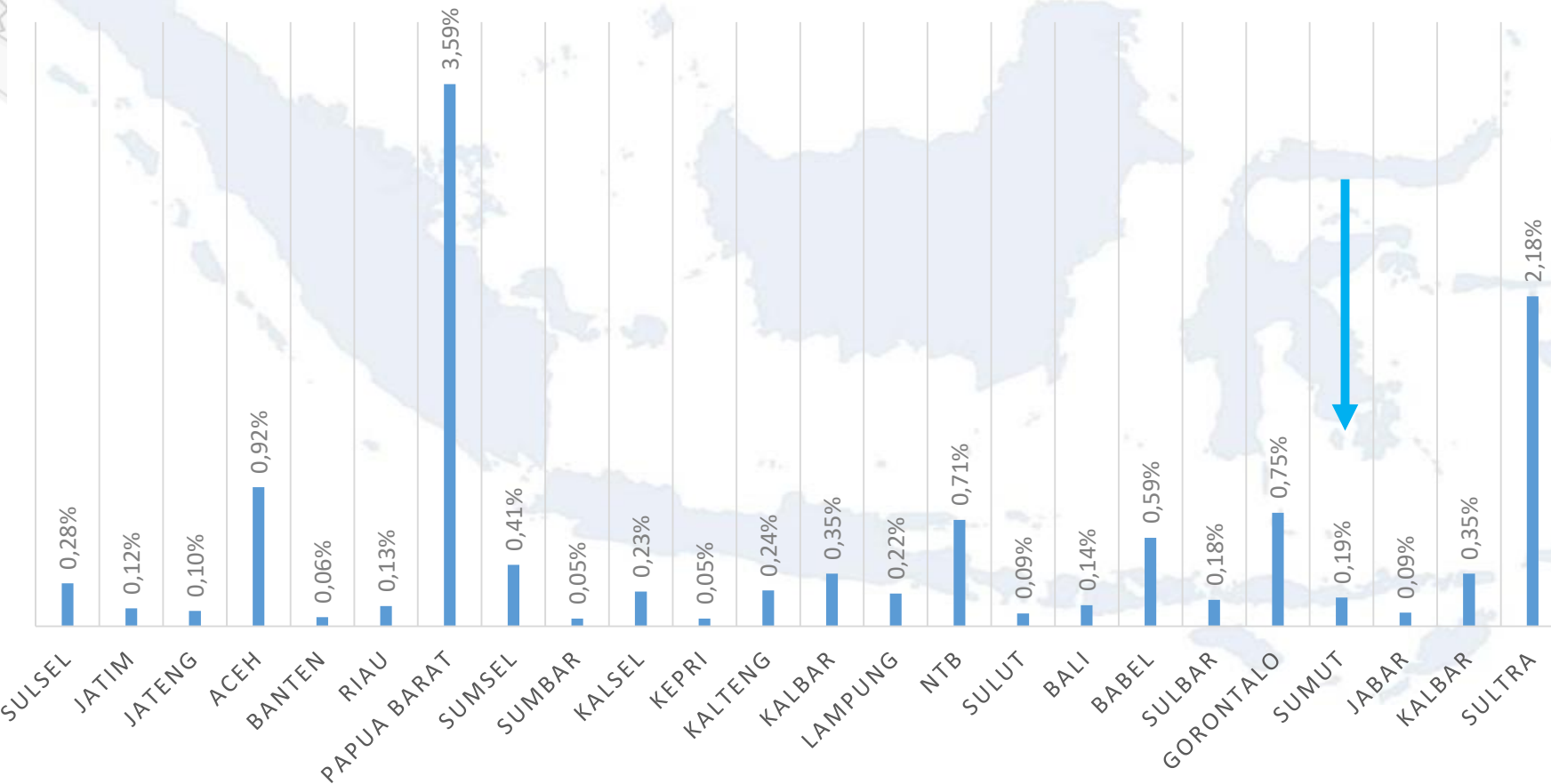
Sumber: SIPD, 2020 (diolah)

ALOKASI SPM KESEHATAN PADA APBD BIDANG KESEHATAN (RKPD 2020)



KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA

% ALOKASI SPM KESEHATAN PADA
APBD BIDANG KESEHATAN



Rata-rata
persentase alokasi
SPM Kesehatan
adalah 0,50% dari
total Alokasi
Kesehatan.

SUMUT alokasi
0,19%

Sumber: SIPD, 2020 (diolah)

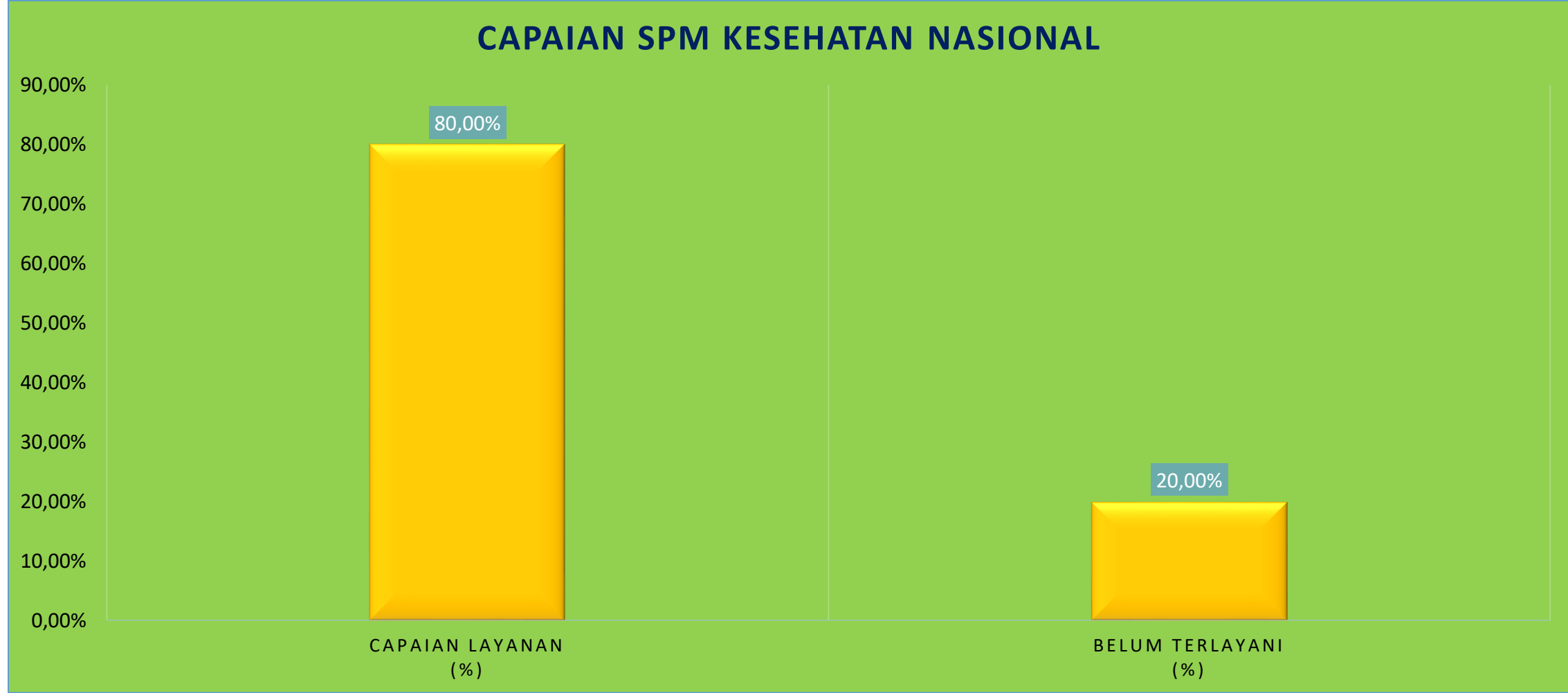


CAPAIAN SPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SUMATER UTARA

Per Desember 2020

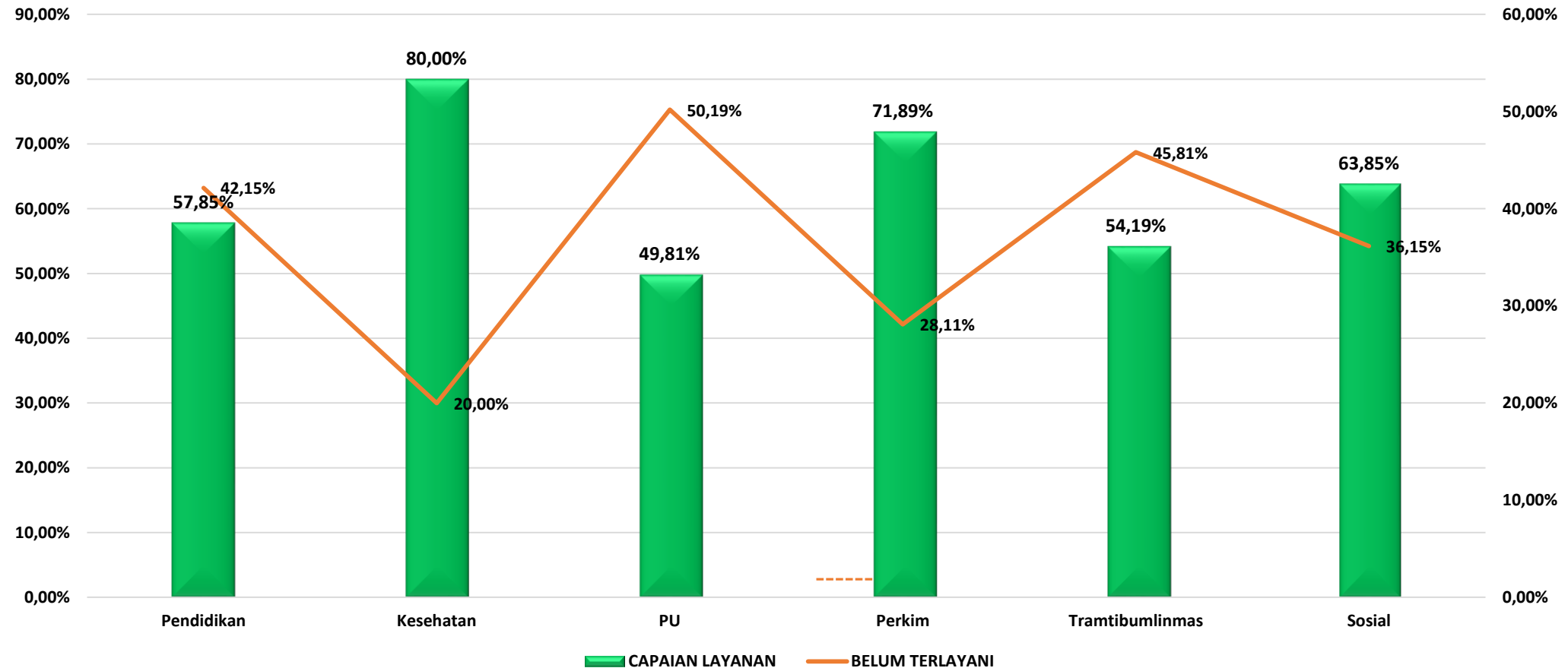


CAPAIAN SPM PROVINSI NASIONAL



Jumlah orang terlayani

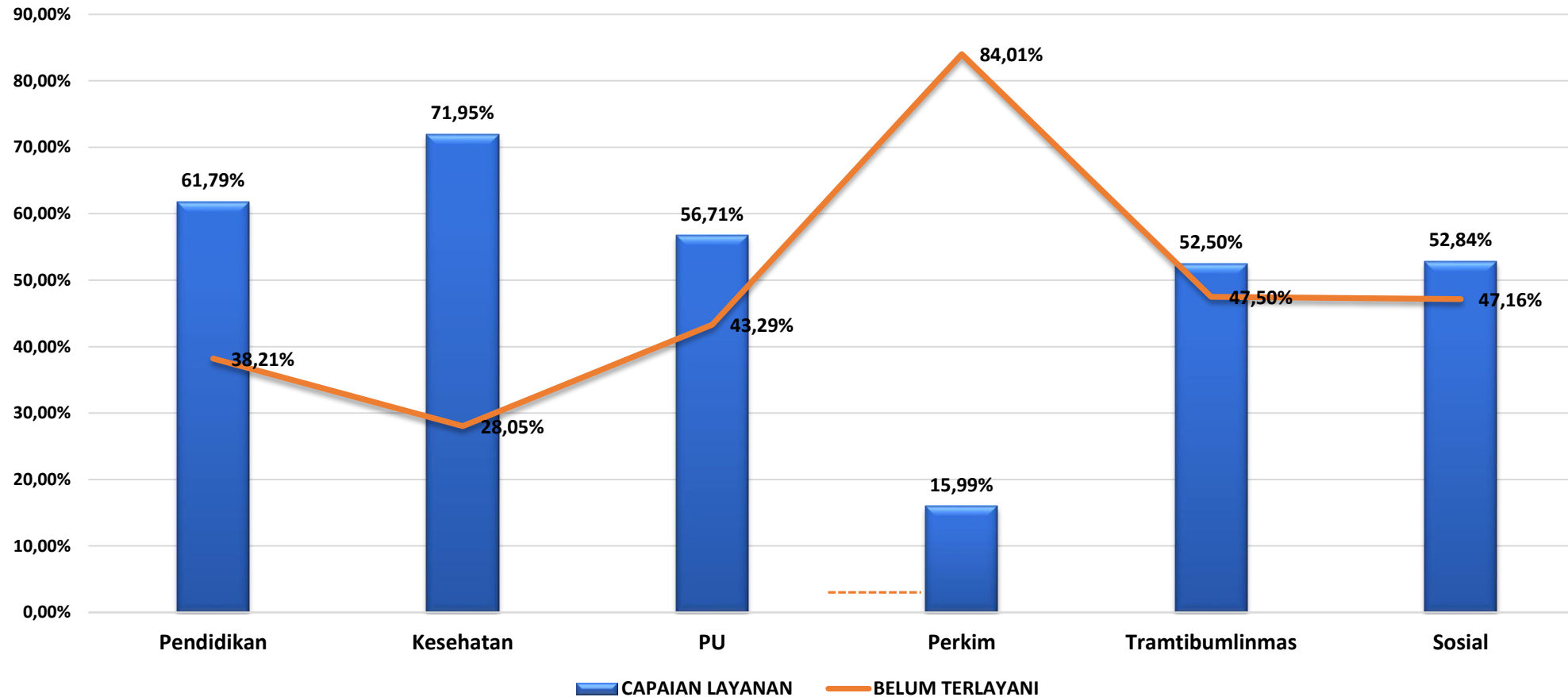
CAPAIAN SELURUH BIDANG PROVINSI NASIONAL



Sumber : Laporan Penerapan SPM dari daerah Tahun 2019

Jumlah orang terlayani

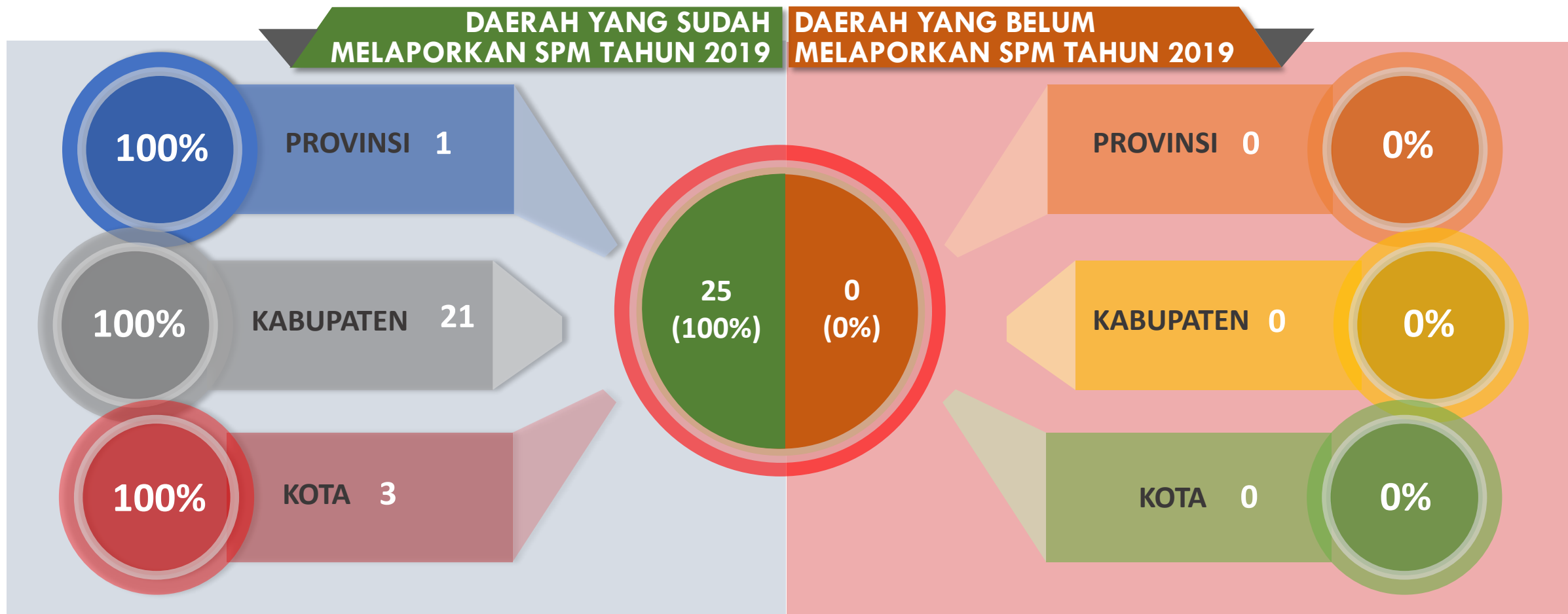
CAPAIAN LAYANAN SELURUH BIDANG KAB/KOTA NASIONAL



Sumber : Laporan Penerapan SPM dari daerah Tahun 2019

Penyampaian Laporan SPM

PROVINSI SUMATERA UTARA



Sumber : Laporan Penerapan SPM dari daerah Tahun 2019

Penyampaian Laporan SPM

WILAYAH SUMATERA



DAERAH YANG SUDAH MELAPORKAN SPM TAHUN 2019

100%

PROVINSI 10

83%

KABUPATEN 99

79%

KOTA 27

136
(86,82%)

28
(38,09%)

DAERAH YANG BELUM MELAPORKAN SPM TAHUN 2019

PROVINSI 0

0%

KABUPATEN 21

18%

KOTA 7

21%

ACEH:

1. Kab. Aceh Selatan
2. Kab. Aceh Tenggara
3. Kab. Aceh Besar
4. Kab. Pidie
5. Kab. Aceh Utara
6. Kab. Aceh Barat Daya
7. Kab. Aceh Jaya
8. Kab. Nagan Raya
9. Kab. Aceh Tamiang
10. Kab. Pidie Jaya
11. Kota Banda Aceh
12. Kota Sabang
13. Kota Lhokseumawe
14. Kota Langsa
15. Kota Subulussalam

Daerah Yang Belum Melaporkan SPM

WILAYAH SUMATERA

Lampung:

1. Kab. Lampung Utara

Bengkulu :

1. Kab. Seluma

Jambi :

1. Kab. Batanghari
2. Kab. Muaro Jambi
3. Kab. Tanjung Jabung Timur
4. Kab. Tebo

Sumatera Utara :

1. Kab. Tapanuli Tengah
2. Kab. Mandailing Natal
3. Kab. Samosir
4. Kab. Labuhanbatu
5. Kab. Labuhanbatu Selatan
6. Kota Medan
7. Kota Gunung Sitoli



DAERAH YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN SPM SUMATERA UTARA

Sumatera Utara:

- 1.Kab. Tapanuli Tengah
- 2.Kab. Mandailing Natal
- 3.Kab. Samosir
- 4.Kab. Labuhanbatu Selatan
- 5.Kab. Labuhanbatu Utara
- 6.Kota Medan
- 7.Kota Gunung Sitoli



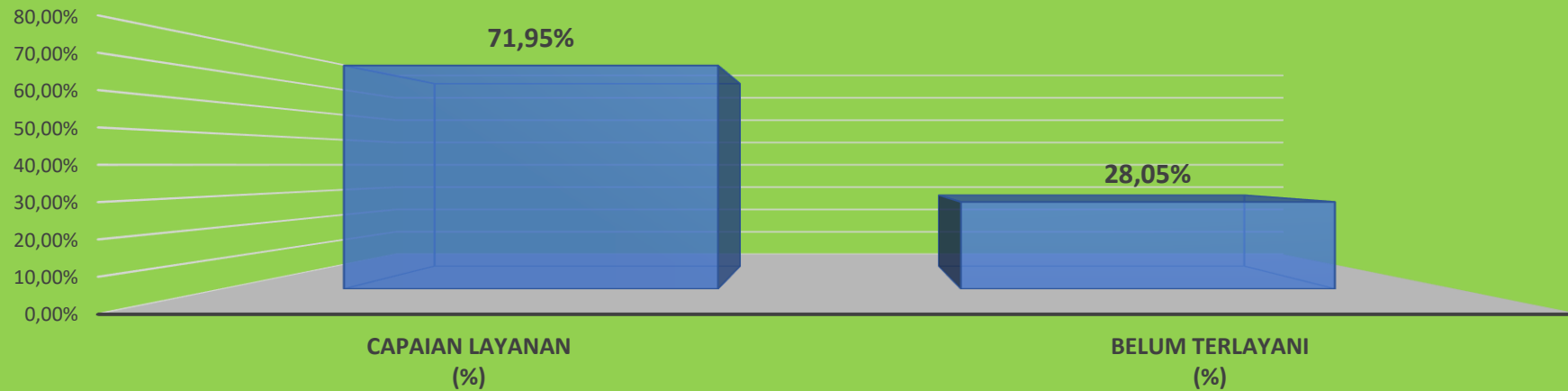
DAERAH YANG BELUM MENYAMPAIKAN TIM PENERAPAN SPM SUMATERA UTARA

2

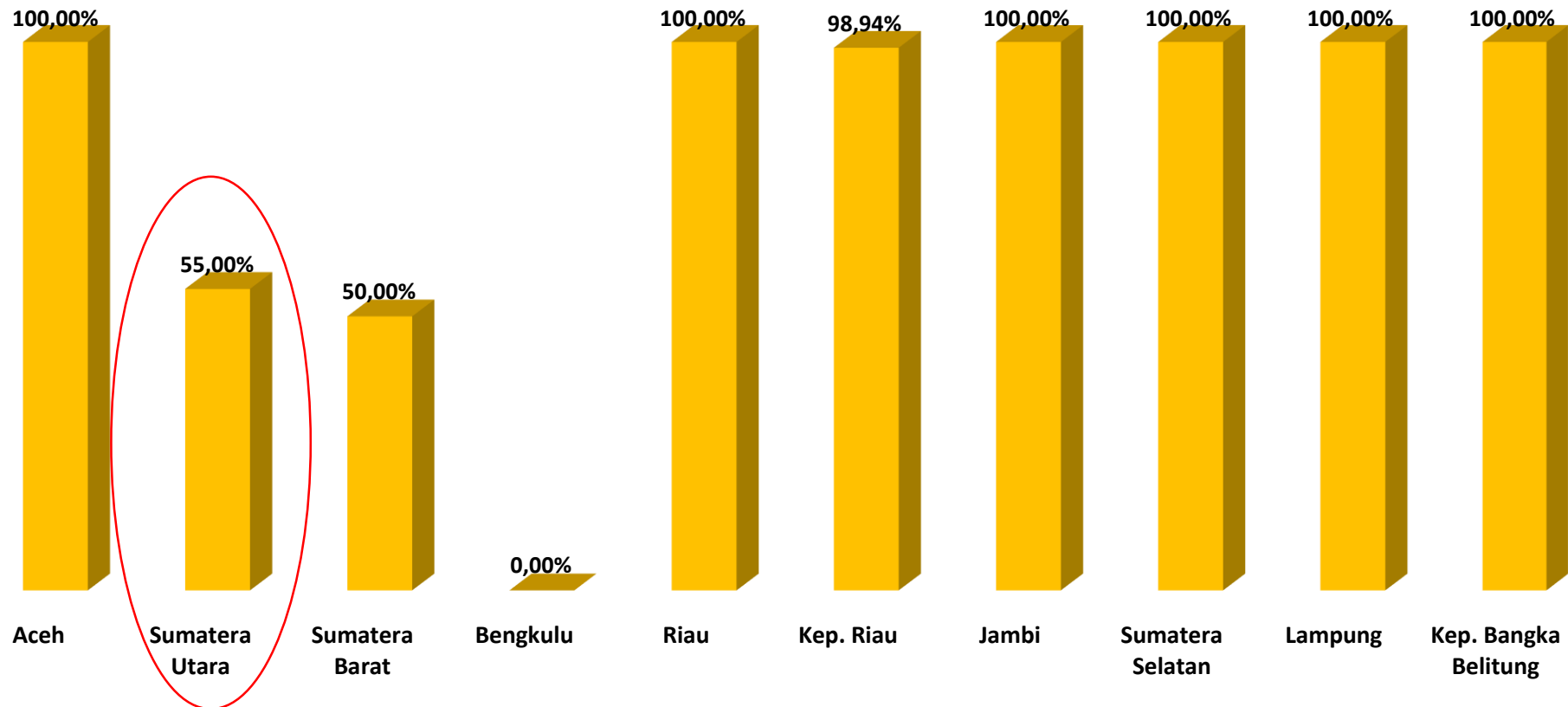
Sumatera Utara

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.Kab. Dairi | 6.Kab. Padang Lawas Utara |
| 2.Kab. Labuhanbatu Selatan | 7.Kab. Samosir |
| 3.Kab. Labuhanbatu Utara | 8.Kota Medan |
| 4.Kab. Langkat | 9.Kota Tanjungbalai |
| 5.Kab. Mandailing Natal | |

CAPAIAN SPM KESEHATAN



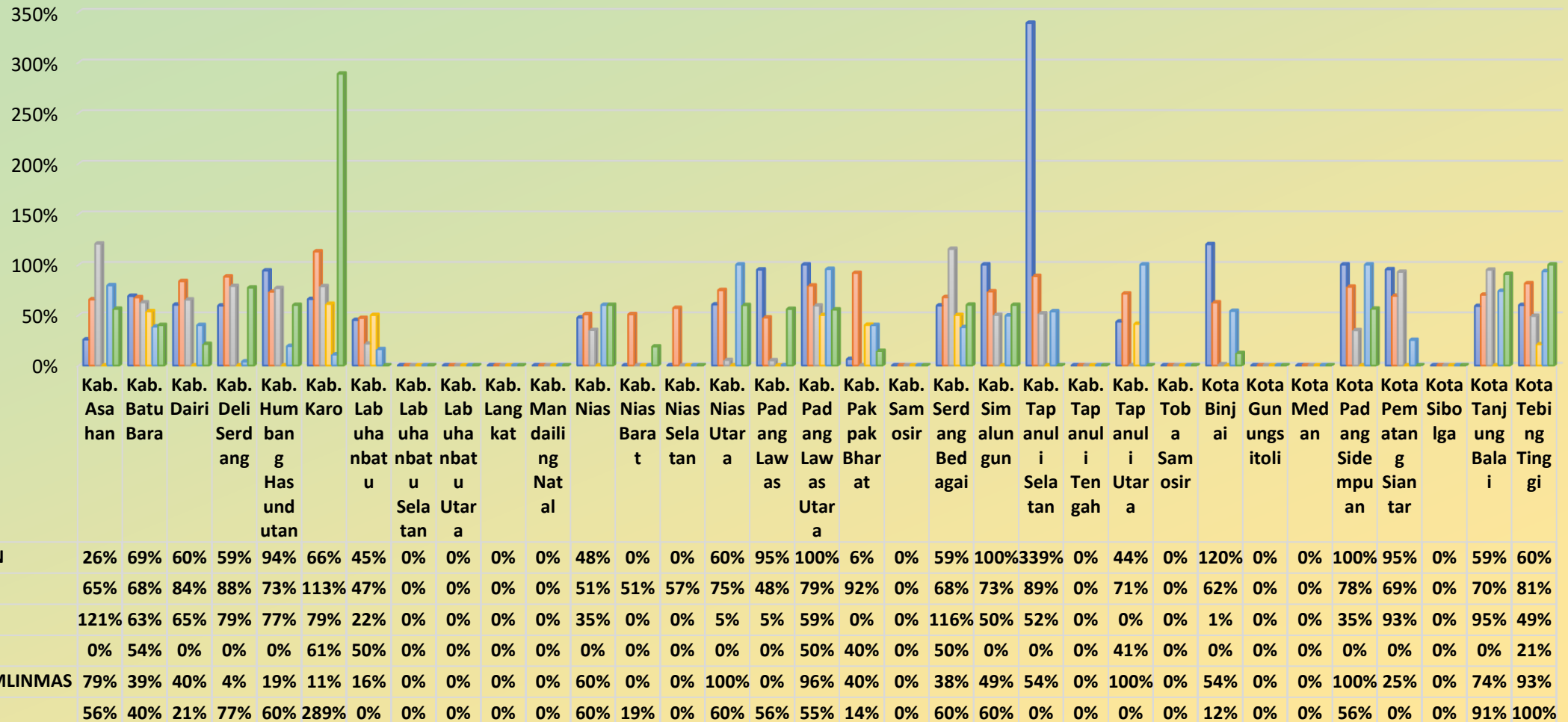
Capaian Bidang Kesehatan Provinsi Lingkup Sumatera





CAPAIAN KINERJA SPM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

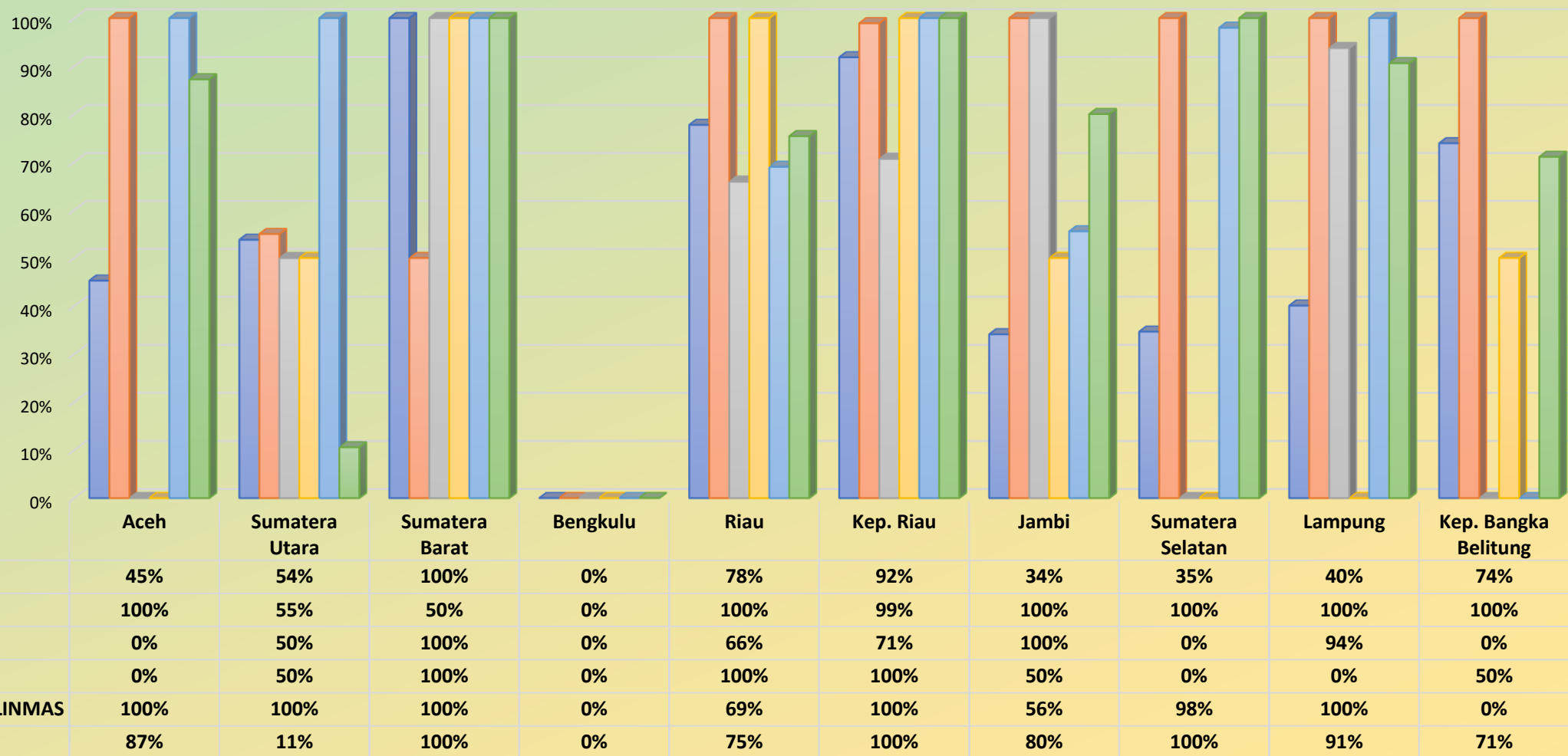
Jumlah orang terlayani



Sumber : Laporan Penerapan SPM dari daerah Tahun 2019

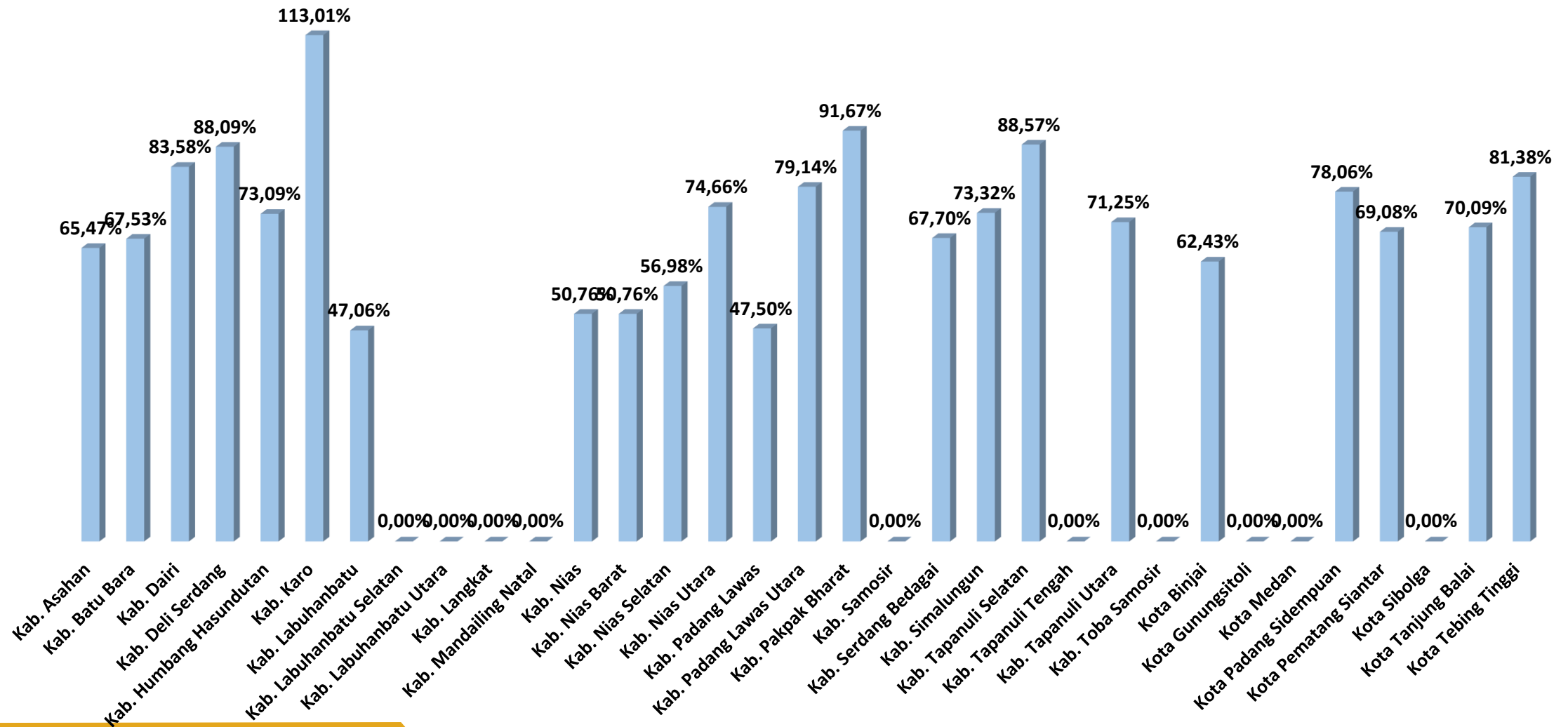


CAPAIAN KINERJA SPM REGIONAL SUMATERA (PROVINSI)->JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI



Sumber : Laporan Penerapan SPM dari daerah Tahun 2019

Capaian Bidang Kesehatan Sumatera Utara





EVALUASI HASIL PENGISIAN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI SPM DI DAERAH TAHUN 2020

Per Desember 2020

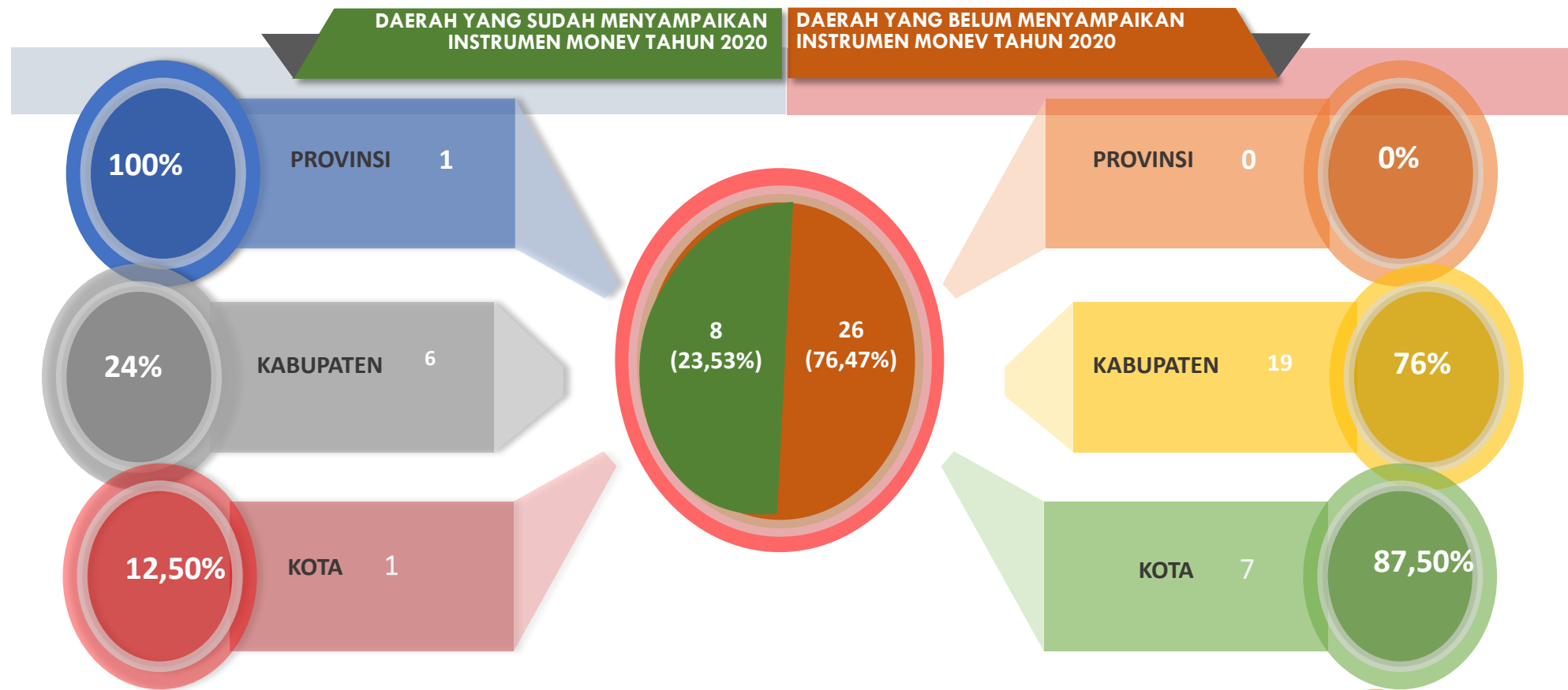


RESPONDEN INSTRUMEN MONEV BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH



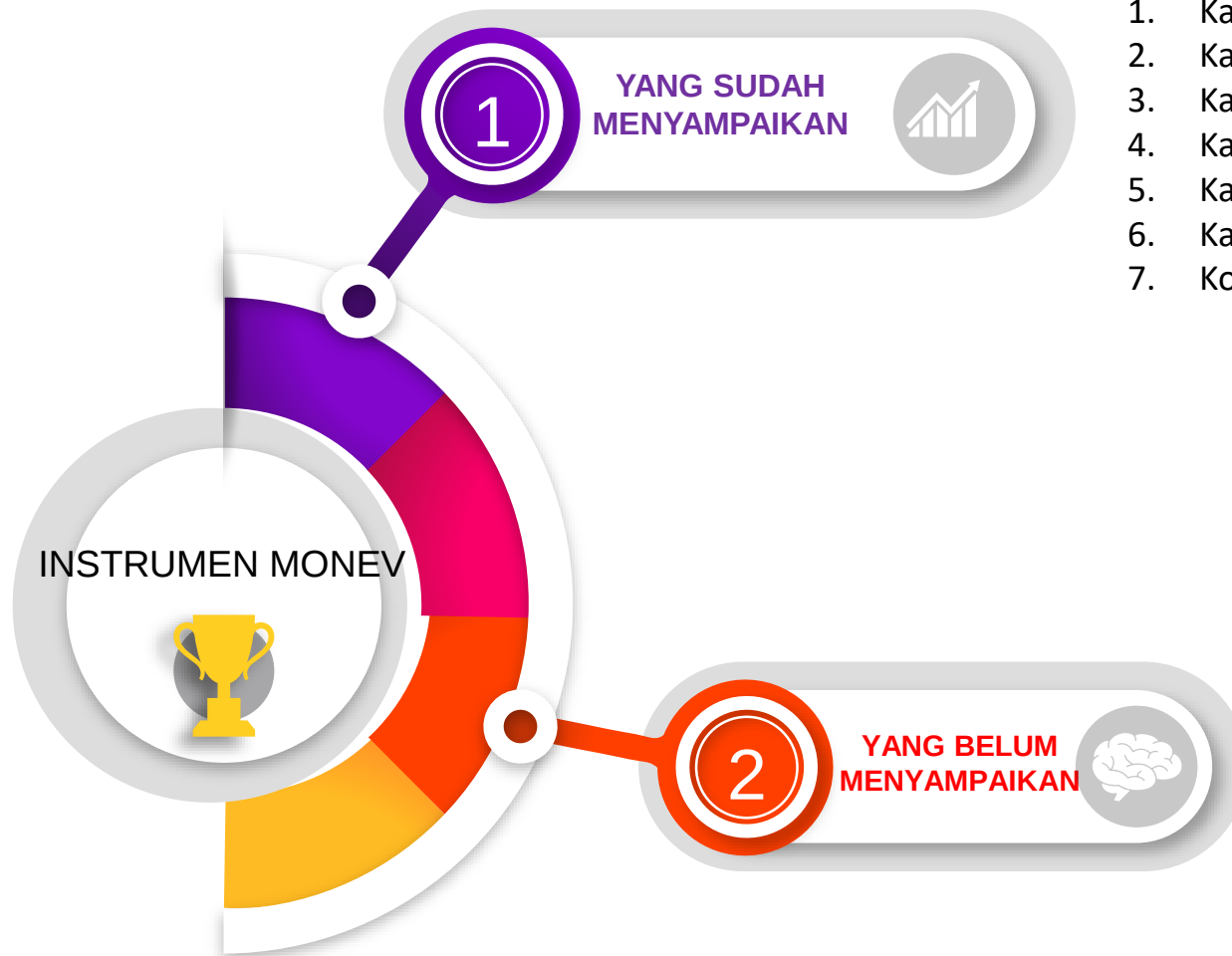
Pengisian Instrumen Money

Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Rekap Bantek Sekber SPM Tahun 2020

INSTRUMEN MONEY SPM KESEHATAN SE-SUMATERA UTARA



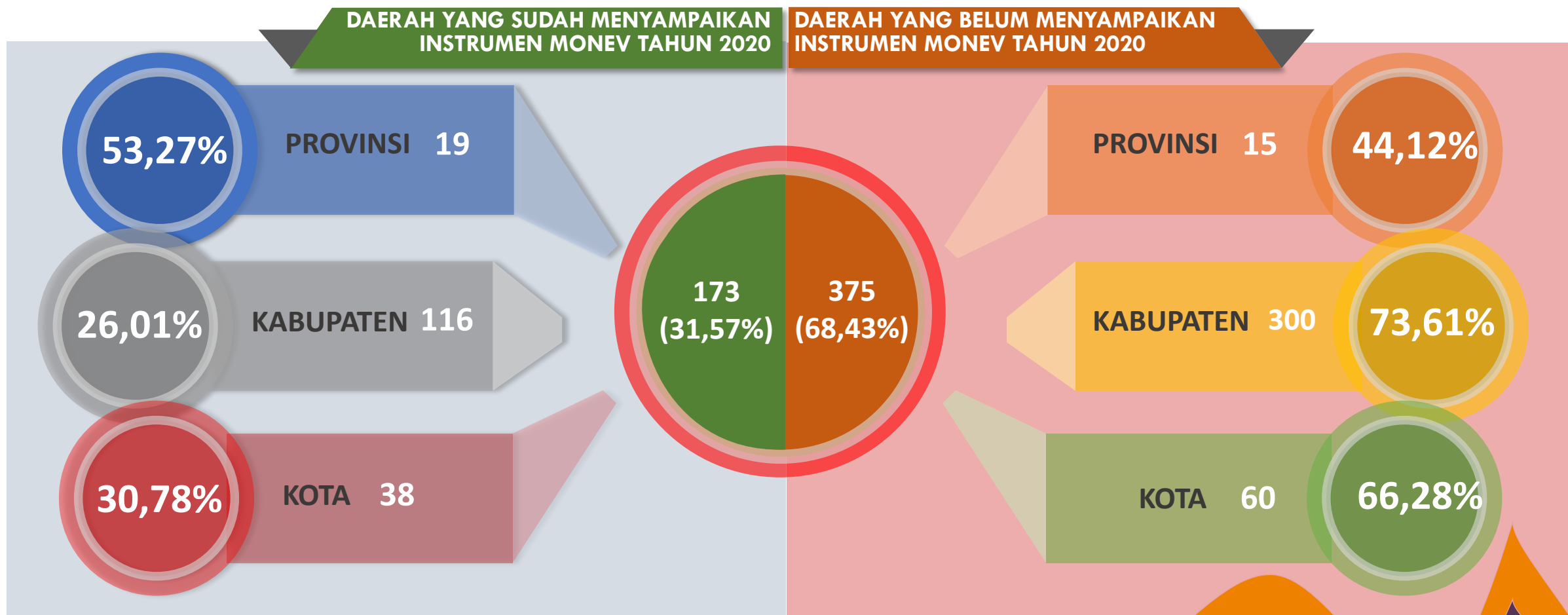
1. Kab. Batubara
2. Kab. Karo
3. Kab. Labuan Batu
4. Kab. Langkat
5. Kab. Nias Selatan
6. Kab. Tapanuli Utara
7. Kota Tebing Tinggi

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Kab. Asahan
3. Kab. Dairi
4. Kab. Deli Serdang
5. Kab. Humbang Hasundutan
6. Kab. Labuhan Batu Selatan
7. Kab. Labuhan Batu Utara
8. Kab. Mandailing Natal
9. Kab. Nias
10. Kab. Nias Barat
11. Kab. Nias Utara
12. Kab. Padang Lawas
13. Kab. Padang Lawas Utara
14. Kab. Pakpak Bharat
15. Kab. Samosir
16. Kab. Serdang Bedagai
17. Kab. Simalungun
18. Kab. Tapanuli Selatan
19. Kab. Tapanuli Tengah
20. Kab. Toba Samosir
21. Kota Binjai
22. Kota Gunung Sitoli
23. Kota Medan
24. Kota Padang Sidempuan
25. Kota Pematang Siantar
26. Kota Sibolga
27. Kota Tanjung Balai

Sumber : Rekap Bantek Sekber SPM Tahun 2020

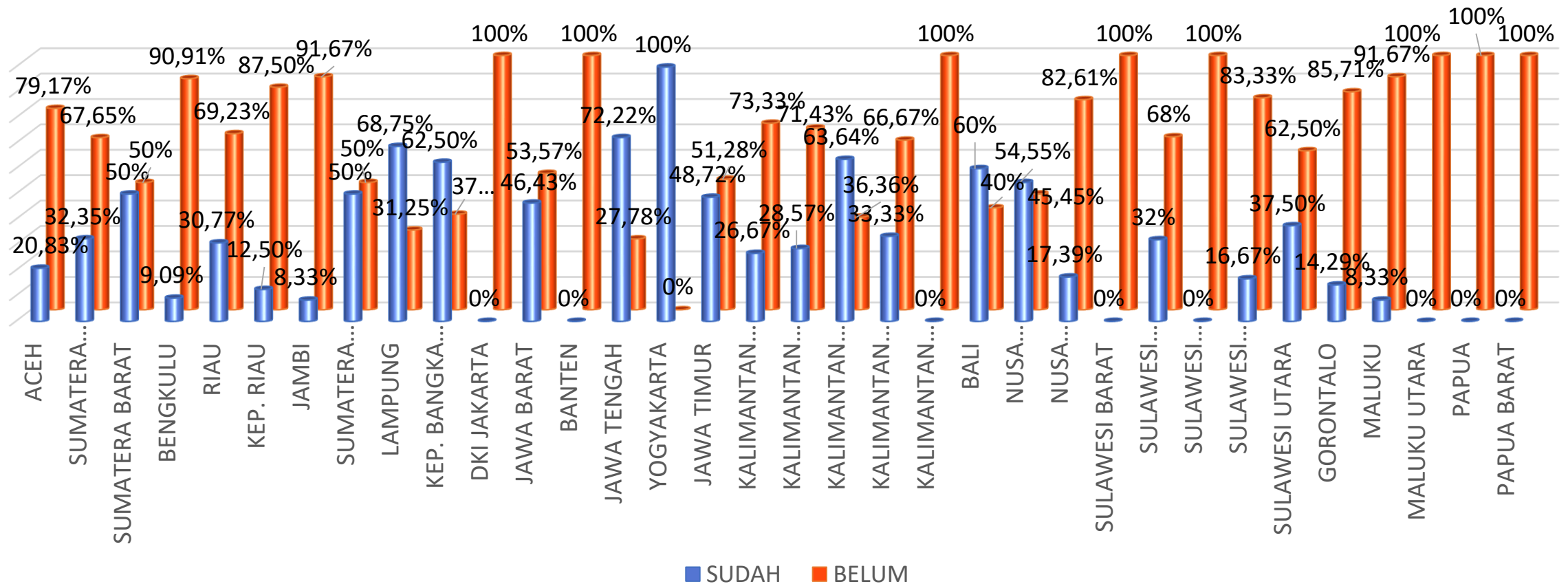
Pengisian Instrumen Money

SELURUH INDONESIA



Sumber : Rekap Bantek Sekber SPM Tahun 2020

Grafik Data Daerah yang belum Melaporkan Instrumen SPM SE- INDONESIA

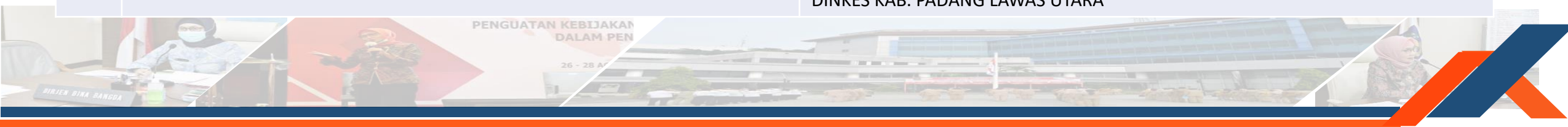




HASIL INSTRUMEN MONEV SE-PROVINSI SUMATERA UTARA

DARI 7 (TUJUH) DAERAH YANG SUDAH MENYAMPAIKAN INSTRUMEN MONEV :

NO	KEGIATAN	DINAS/DAERAH
1.	DAERAH YANG SUDAH MENDAPATKAN SOSIALISASI REGULASI BIDANG KESEHATAN	TAPEM KAB. BATUBARA TAPEM KAB. KARO TAPEM. TAPANULI UTARA TAPEM KOTA TEBING TINGGI DINKES KAB. KARO DINKES KAB. LABUHAN BATU DINKES KAB. LANGKAT DINKES KAB. PADANG LAWAS UTARA DINKES KAB. TAPANULI UTARA
2.	DAERAH YANG MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KESEHATAN	DINKES KAB. KARO DINKES KAB. LABUHAN BATU DINKES KAB. TAPANULI UTARA
3.	DAERAH YANG SUDAH MENERAPKAN SPM SESUAI DENGAN PERMENKES NOMOR 4 TAHUN 2019	DINKES KAB. KARO DINKES KAB. LANGKAT DINKES KAB. PADANG LAWAS UTARA DINKES KAB. TAPANULI UTARA
4.	DAERAH YANG SUDAH MELAKUKAN INTEGRASI DOKRENDA	DINKES KAB. KARO DINKES KAB. LABUHAN BATU DINKES KAB. LANGKAT DINKES KAB. PADANG LAWAS UTARA





HASIL ANALISIS INSTRUMEN MONEV

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

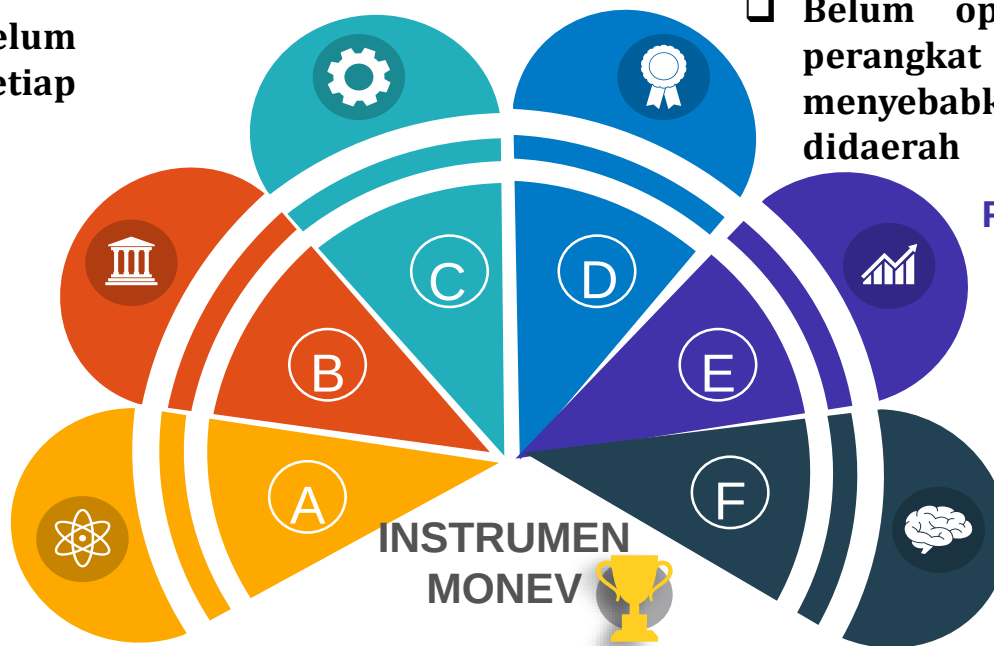
- ❑ Pelaksanaan Bimtek belum optimal dan merata untuk setiap bidang SPM

SOSIALISASI

- ❑ Belum semua perangkat daerah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan SPM

WAKTU PENYERAHAN INSTRUMEN

- ❑ Masih banyak daerah yang belum menyerahkan instrumen monev tepat pada waktunya



PENERAPAN SPM SESUAI PERMEN TEKNIS

- ❑ Belum optimalnya pemahaman dan kinerja perangkat daerah berbasiskan regulasi yang menyebabkan belum efektifnya penerapan SPM di daerah

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

- ❑ Hampir semua daerah belum menyusun rencana aksi penerapan SPM

INTEGRASI SPM KE DALAM DOKRENDA

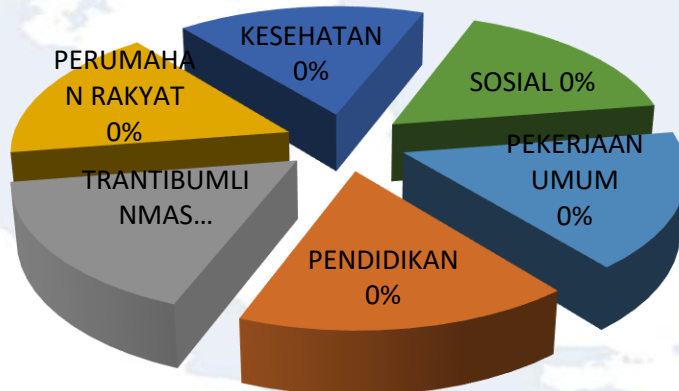
- ❑ Integrasi SPM ke dalam dokrenda belum sepenuhnya dilakukan oleh daerah



Penyampaian Data Keterisian Aplikasi

PROVINSI SUMATERA UTARA

DATA KETERISIAN CAPAIAN APLIKASI SPM



**SUDAH MENGISI
APLIKASI SPM**

0%

**BELUM MENGISI
APLIKASI SPM**

100%

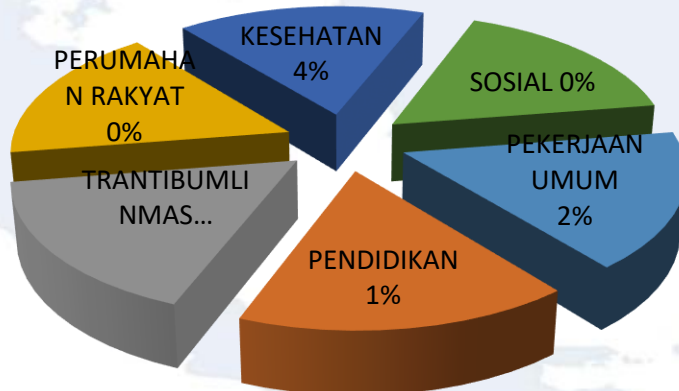




Penyampaian Data Keterisian Aplikasi

Se - PROVINSI SUMATERA UTARA

DATA KETERISIAN CAPAIAN APLIKASI SPM



**SUDAH MENGISI
APLIKASI SPM**

6%

**BELUM MENGISI
APLIKASI SPM**

94%





TANTANGAN MENCAPAI 100% SPM KESEHATAN

Per Desember 2020



TANTANGAN MENCAPAI 100% SPM KESEHATAN

1

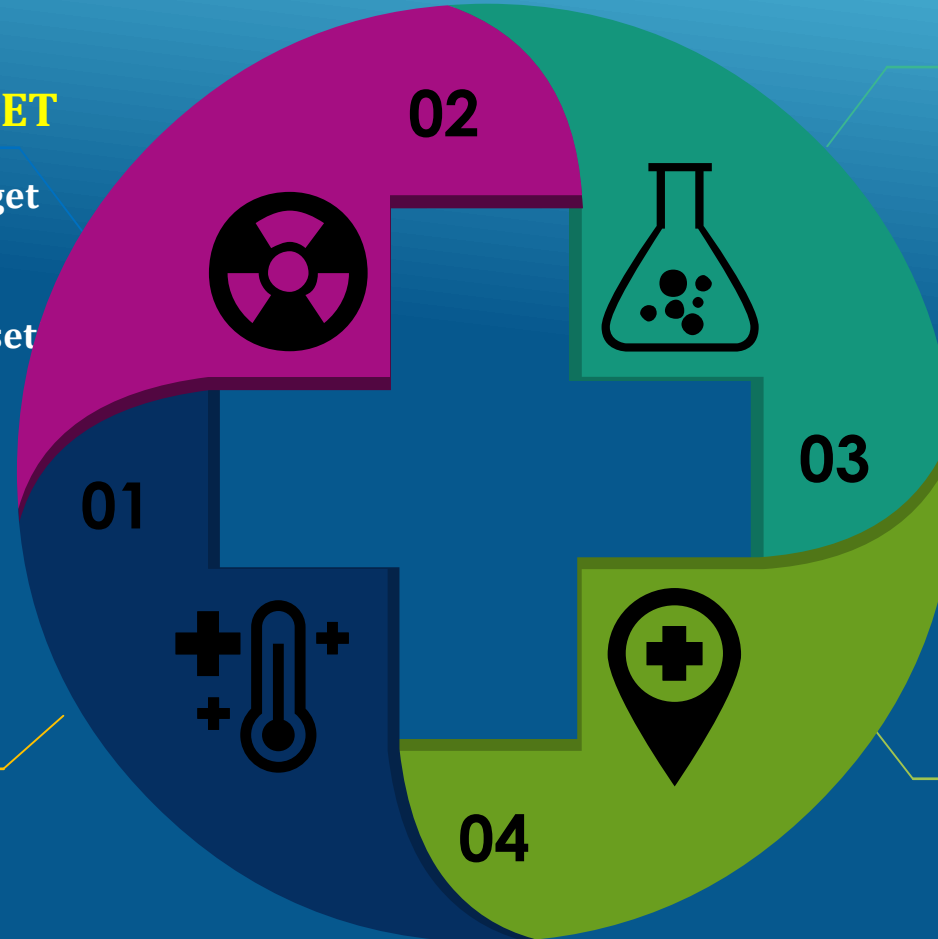
PENETAPAN SASARAN & TARGET

- ☐ Daerah belum menetapkan # Target
- ☐ Tidak memiliki data penduduk lengkap & data Sasaran
- ☐ Belum memahami siapa Sasaran set jenis pelayanan dasar (JPD)

3

SDM - SARANA - PRASARANA

- ☐ SDM Pelaksana belum tersedia lengkap pada semua Puskesmas
- ☐ Sarana-Prasarana-Alkes belum lengkap (sesuai standar mutu)
- ☐ Dukungan reagents, vaksin, dll (kewenangan pusat) tidak cukup



2

PEMBIAYAAN

- ☐ Tidak / belum menghitung pembiayaan secara ideal
- ☐ Dukungan pembiayaan dari APBD belum 100%
- ☐ Dukungan reagents, vaksin, dll (kewenangan pusat) tidak cukup

4

PENERAPAN DAN INOVASI PENCAPAIAN TARGET SPM

- ☐ Pelayanan SPM masih business as usual, belum intens – tak ada inovasi
- ☐ Kerjasama & integrasi layanan dengan Fasyankes Swasta belum solid
- ☐ Inovasi parsial, belum dikerjakan oleh seluruh Puskesmas



PENUTUP



KESIMPULAN



SPM Kesehatan telah di atur dalam banyak kebijakan, agar menjadi perhatian Pemda sehingga capaian bisa 100%; SPM merupakan indikator utama penilaian kinerja Pemda.



Untuk dapat mencapai 100% SPM Kesehatan, maka strategi utamanya adalah mengikuti langkah-langkah Penerapan SPM Kesehatan sesuai Permendagri 100 Tahun 2018 (kompherensif & berbasis data)



Diperlukan pemantauan apakah kebutuhan data pada setiap langkah kegiatan telah dipenuhi dalam proses perencanaan sehingga besaran target, besaran anggaran, capaian dan lain-lain dapat di monitor Aplikasi Monev SPM Kesehatan (Kemendagri)



Capaian SPM Kesehatan di Sumatera Utara relatif belum di isi, mohon segera diisi.



TERIMA KASIH

